

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan

Menurut Sugiono, dkk. (2009), perusahaan memiliki laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi didalam siklus akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Sugiono, dkk. (2009) juga menjelaskan bahwa informasi yang berisi kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan akan berguna bagi berbagai pihak, baik pihak yang ada di dalam perusahaan (internal) maupun pihak yang ada diluar perusahaan (eksternal). Oleh karena itu, laporan keuangan digunakan sebagai alat komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memerlukan data keuangan perusahaan. Mahmudi (2011) menjelaskan tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai arus kas, realisasi anggaran, posisi keuangan, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperan dalam membuat evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia. Pengguna laporan keuangan dari pihak eksternal ada beragam, dan salah satunya merupakan pemerintah pusat dan daerah.

2.2. Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 18 ayat (5) UUD 1945, pemerintah daerah merupakan X daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemerintah daerah, berhubungan erat dengan tiga asas dalam pemerintahan negara, yakni sebagai berikut:

1. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan alam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

3. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki bentuk pertanggungjawaban mengenai kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas, maka dari itu pemerintah daerah harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk fisik atas pertanggungjawabannya kinerjanya selama satu periode.

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintahan No 8 Tahun 2006, dijelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Nerdiawan dan Hertianti (2010) menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk fisik pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk mendapatkan informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa mendatang. Laporan keuangan berfungsi memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan data.

1. Kelangsungan organisasi (*viability*); Laporan keuangan berfungsi membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa mendatang.
2. Hubungan masyarakat (*public relation*); Laporan keuangan berfungsi memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*); Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam pelaporannya, laporan keuangan sebaiknya juga mempunyai kualitas yang baik agar pengguna atau pembaca dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh penyusun.

2.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, menjelaskan karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan-laporan keuangan daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
- a. Penyajian Jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c. Netralitas informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diambil dari penelitian Ulfa (2018) dengan metode penelitian dengan variabel independen sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia.

2.5. Faktor - faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun *et al* (2012), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pemakai. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menjelaskan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

2.5.1 Sistem Informasi Akuntansi

Sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem informasi akuntansi oleh Widjanto (2001) didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem Informasi Akuntansi merupakan susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan.”

Sedangkan menurut Romney *and* Steinbart (2004) :

“Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang melakukan serangkaian proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data akuntansi serta data lainnya untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.”

Menurut Mulyadi dalam Indrayati (2015) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap kekayaan perusahaan.
4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Dalam suatu organisasi, sistem informasi memiliki peran yang penting. Perancangan sistem informasi akuntansi harus tepat dan baik agar dapat

menjalankan fungsinya sebagai alat yang digunakan untuk menganalisis data yang nantinya akan menghasilkan sebuah informasi.

Menurut Susanto (2017) bahwa terdapat tiga fungsi utama sistem informasi akuntansi, sebagai berikut:

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Suatu perusahaan agar dapat tetap eksis perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan.
2. Mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan yang sama pentingnya dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab penting adalah keharusan memberi informasi kepada pemakai yang berada di luar perusahaan yang meliputi pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investasi besar, serikat kerja, analis keuangan, asosiasi industri, atau bahkan publik secara umum.

Romney *and* Steinbart (2004) mengklasifikasikan komponen Sistem Informasi Akuntansi menjadi 6, yaitu :

1. Orang yang menjadi pengguna sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnis organisasi tersebut.
4. Software yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, perangkat perifer, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan pada sistem informasi akuntansi.

6. Pengendalian internal dan tindakan keamanan yang menjaga data sistem informasi akuntansi.

Komponen-komponen yang disebutkan diatas menjadi indikator dalam pengukuran sistem informasi yang diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Saipullah (2017).

Dalam pemerintah daerah sistem informasi akuntansi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mendefinisikan sistem informasi keuangan daerah sebagai :

“Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.”

Tujuan pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD yaitu:

1. Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan keuangan daerah.
2. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah.
3. Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah.
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat.
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Penyelenggara SIKD meliputi :

1. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah.
3. Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

2.5.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wilkinson *et al* (2000), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*intranet, internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia. Teknologi informasi dapat memungkinkan para atasan terhubung lebih baik dengan para karyawan dan lingkungan sekitar organisasi. Teknologi informasi juga memiliki implikasi-implikasi yang positif untuk praktik manajemen, walaupun juga bisa menghadirkan berbagai masalah (Daft, 2008).

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data (Toban, 2017).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi

keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson *et al*, 2000).

Berdasarkan indikator-indikator yang disebutkan di atas, pengukuran pemanfaatan teknologi informasi akan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari oleh penelitian Ulfa 2018

2.5.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Laporan keuangan yang dihasilkan suatu entitas harus dapat memenuhi karakteristik kualitatifnya. Maka dari itu, sistem pengendalian internal perlu ditunjang oleh sumber daya yang andal. Sumber daya yang dibutuhkan tidak dapat dilihat sebagai bagan yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini, peran sumber daya manusia sangat menentukan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan (Sutrisno, 2009).

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Kharis, 2010).

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan pengalaman di bidang keuangan. Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu:

1. Pengetahuan.

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya. Pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan.

Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan dalam memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.

3. Sikap.

Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan organisasi.

Ketiga komponen tersebut menjadi indikator dalam pengukuran kompetensi sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Darmawan (2018).

2.5.4. Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan pengendalian intern adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Unsusr-unsur SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (Toban, 2017).

Konsep pengendalian internal yang saat ini dijumpai di akuntansi, banyak terpengaruh oleh sistem pengendalian yang dirancang oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations*) (Winarno, 2006). Komponen pengendalian internal menurut COSO dalam Winarno (2006) ada lima, yaitu:

1. *Control environment* atau lingkungan pengendalian.
Lingkungan pengendalian menunjukkan atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*.
2. *Control activities* atau aktivitas pengendalian.
Aktivitas pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif.
3. *Risk assessment* atau pemahaman risiko.
Penilaian risiko merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.
4. *Information and communication* atau informasi dan komunikasi.
Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional.
5. *Monitoring* atau pemantauan.

Pengawasan merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari system pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan).

Kelima komponen tersebut menjadi indikator dalam pengukuran sistem pengendalian internal yang diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Darmawan (2018).

Menurut Winarno (2006) sistem pengendalian intern memiliki empat tujuan, yaitu:

1. Melindungi harta kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan dapat berupa kekayaan yang berwujud maupun kekayaan yang tidak berwujud. Kekayaan perusahaan sangat diperlukan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Bangunan, peralatan, mesin-mesin, semuanya bernilai sangat material dari segi keuangan dan sangat diperlukan dalam segi teknis operasional.
2. Meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang dijalankan oleh perusahaan. Informasi menjadi dasar pembuatan keputusan. Apabila informasi salah, keputusan yang diambil baik oleh manajemen maupun pihak lain dapat salah. Keputusan yang salah akan sangat merugikan perusahaan. Agar informasi tidak salah, perlu dilakukan pengawasan terhadap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan.
3. Meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, sehingga dalam berbagai kegiatan dapat dilakukan penghematan. Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara besarnya pengorbanan dan hasil yang diperoleh. Semakin kecil pengorbanan namun hasil yang diperoleh tetap sama, menunjukkan perusahaan efisien. Perusahaan yang efisien akan lebih mudah mendapatkan laba yang besar. Laba yang besar sangat

diharapkan oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan dan jajaran karyawan.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Secara berkala, manajemen telah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila semua pihak di dalam perusahaan bekerja sama dengan baik. Di dalam suatu perusahaan terdapat banyak orang yang memiliki berbagai kepentingan, namun kepentingan mereka tidak boleh bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Di sisi lain manajemen juga harus menetapkan tujuan yang tidak terlalu tinggi.

2.6. Teori Keagenan (Agency Theory)

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan informasi tersebut. Menurut Mardiasmo (2002), pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat.

Dalam hal ini terdapat sebuah hubungan antara publik dan pemerintah, yang disebut hubungan agensi. Hubungan agensi adalah hubungan yang timbul antara satu pihak, yang disebut prinsipal, yang menyewa pihak lain, yang disebut agen, untuk melakukan sejumlah jasa (Supriyono, 2000). Dalam hal ini rakyat berkedudukan sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen untuk menjalankan tugas pemerintahan (Darmawan, 2018).

Laporan keuangan sebagai hasil pertanggungjawaban pemerintah, dalam prakteknya didasari oleh teori keagenan (*agency theory*). Menurut Supriyono (2000), teori keagenan adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor

utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan kontrak-kontrak insentif untuk memotivasi para individu mencapai keselarasan tujuan.

Dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan. beberapa di antaranya adalah penerapan sistem informasi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan kekuatan koersif. Keempat faktor tersebut sangat berkaitan dengan bagaimana membuat masyarakat yakin bahwa pemerintah akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakni dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.7. Hubungan Antar Variabel

2.7.1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Widjajanto (2001) Sistem Informasi Akuntansi didefinisikan sebagai berikut :

“Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan.”

Laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan berkualitas apabila mencakup keempat karakteristik kualitatif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Informasi keuangan yang baik sangat diperlukan juga dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah. Penggunaan sistem informasi yang berkualitas akan membuat pemerintah daerah mendapat informasi keuangan yang baik sehingga kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan terjamin (Susanto, 2013).

2.7.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan system informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengelolaan informasi, system manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson *et al*,2000).

2.7.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Havsei (2005) mengutarakan bahwa untuk mengoptimalkan tujuan organisasi harus memiliki daya kompetensi yang tinggi. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki latar belakang Pendidikan akuntansi, seiring mengikuti Pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berpengaruh pada kekeliruan laporan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.7.4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

American Institute of Certified Public Accountants merupakan sebuah organisasi profesi akuntansi di Amerika Serikat mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal dalam Winarno (2006) sebagai berikut :

“Rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.”

Suatu sistem yang berkualitas, dirancang dibangun, dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal. Salah satu tujuan sistem pengendalian internal menurut Winarno (2006) adalah untuk meningkatkan akurasi informasi akuntansi.

Dalam pasal 12 UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah. Atas dasar itu yang wajib menjadi penguji dan menilai SPI pemerintah daerah yang bersangkutan adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK).

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan menggunakan sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi SDM sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian Nurillah dan Muid (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah menggunakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah variabel dependen. Untuk variabel independen yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari empat pengujian, yaitu uji kualitas data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji model. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu dari Shintia dan Erawati (2017) memiliki judul Pengaruh Kualitas SDM, Sistem Informasi, Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi pada Kualitas Laporan Keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependennya dan memiliki objek penelitian di Kabupaten Klungkung. Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah kualitas SDM, sistem informasi, pengendalian intern, dan komitmen organisasi sebagai variabel independennya dimana masing-masing variabel diukur dengan indikator yang berbeda-beda. Variabel sumber daya manusia diukur dengan 3 indikator, variabel pemanfaatan sistem informasi dengan 4 indikator, variabel sistem pengendalian intern dengan 4 indikator, dan variabel komitmen organisasi diukur dengan 7 indikator. Untuk variabel kualitas laporan keuangan sendiri diukur dengan 4 indikator, dengan analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel tersebut. Hasil dari analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah semua variabel memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung.

Penelitian Sukmaningtyas (2017) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki objek penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali. Variabel independen yang terdapat dalam penelitian adalah sistem pengendalian intern, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Penelitian terdahulu ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linier. Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laporan keuangan, dan yang terakhir variabel pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporannya.

Penelitian terdahulu berikutnya merupakan penelitian dari Prastiwi dan Mimba (2018) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Kualitas Laporan Keuangan. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel independennya adalah sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan akuntansi berbasis akruaI. Dalam penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk naratif untuk menganalisa pengaruh atau hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, responden menunjukkan kecenderungan persepsi yang baik terhadap ketiga variabel yang diteliti yaitu, pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan akuntansi berbasis akruaI. Penelitian yang dilakukan dengan objek di daerah provinsi Bali ini menunjukkan juga bahwa laporan keuangan yang disusun pantas untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Penelitian terdahulu yang terakhir merupakan hasil penelitian dari Ulfa (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Medan. Variabel yang digunakan dalam penelitian antara lain sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi SDM sebagai variabel independennya serta kualitas

laporan keuangan sebagai variabel dependennya. Dalam penelitian terdahulu ini, analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan *software* LISREL. Untuk menguji kecocokan model, penelitian ini menggunakan ukuran kecocokan mutlak (*absolute fit measures*), ukuran kecocokan inkremental (*incremental/ relative fit measures*), dan ukuran kecocokan parsimony (*parsimonious/ adjusted fit measures*) sedangkan untuk pengujian hipotesisnya menggunakan uji simultan (Uji-F) dan uji parsial (Uji-t). Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan (sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Medan baik dari hasil penelitian dengan pengujian secara simultan maupun parsial.

Tabel 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Artikel Jurnal	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Annisa Nur Sakinah Koto (2019) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern. 2. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern. 3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 4. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 5. Variabel sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan Keuangan. 6. Variabel sistem pengendalian intern tidak bisa memediasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan Deasy dan Dewi (2014). 7. Variabel sistem pengendalian intern tidak bisa memediasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan

Deasy dan Dewi (2014) dan Akhmad (2014).

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik | Susana Magdalena Roswita Pone (2018) Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas 2. Pengendalian Intern Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. |
| 3 | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating | Hardyansyah (2016) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi dan memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. 4. Uji nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern mampu memoderasi dan memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. |
| 4 | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangandaerah, Pemanfaatan teknologi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Yulis Widayanti (2019) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Ketahanan Pangan. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Ketahanan Pangan. |

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy | Putriasri Pujanira (2017) Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta | 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Ketahanan Pangan.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung.
1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.
3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. |
|---|---|---|---|

Sumber : Penelitian terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Susanto (2013) mengatakan bahwa penggunaan sistem informasi yang berkualitas akan membuat pemerintah daerah mendapat informasi keuangan yang baik sehingga kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan terjamin. Dalam

hasil penelitiannya, Shintia dan Erawati (2017) menyatakan bahwa sistem informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada laporan keuangan pemerintah daerah SKPD di Kabupaten Klungkung, yang mengakibatkan semakin tingginya penggunaan sistem informasi dalam suatu perusahaan maka semakin baik kualitas laporan keuangannya, begitu pula sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan Ulfa (2018) baik menggunakan pengujian simultan/serempak maupun pengujian parsial menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Medan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ = Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.9.2. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik.

Hasil penelitian yang dilakukan Sukmaningtyas didukung pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) yang memiliki hasil berpengaruh positif dengan menunjukkan semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian dari Roshanti dkk (2014) juga mendukung hasil dari penelitian Sukmaningtyas dengan menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Ulfa (2018) menunjukkan bahwa baik menggunakan pengujian simultan/serempak maupun pengujian parsial pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Medan. Penelitian terdahulu dari Sukmaningtyas (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dapat dilihat dengan adanya jumlah komputer yang cukup memadai, terpasangnya jaringan internet yang memudahkan pegawai dalam akses dan transfer data, kemudian proses penyusunan laporan keuangan di setiap SKPD sudah dibantu dengan suatu aplikasi akuntansi yang bernama sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂ = Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.9.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang dihasilkan suatu entitas harus dapat memenuhi karakteristik kualitatifnya. Maka dari itu, sistem pengendalian internal perlu ditunjang oleh sumber daya yang andal. Sumber daya yang dibutuhkan tidak dapat dilihat sebagai bagan yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini, peran sumber daya manusia sangat menentukan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan (Sutrisno, 2009).

Menurut penelitian-penelitian terdahulu kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di masing-masing objek memiliki hasil yang berbeda-beda. Ulfa (2018) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Medan, Prastiwi dan Mimba (2018) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Sukmaningtyas (2017) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali. Kemudian Shintia dan Erawati (2017) menyimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai di SKPD Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan suatu tugas untuk membuat laporan keuangan maka kemampuan dalam membuat laporan keuangan akan semakin baik, atau kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nurillah dan Muid (2014) menyatakan bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang berbeda di masing-masing objeknya. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃ = Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

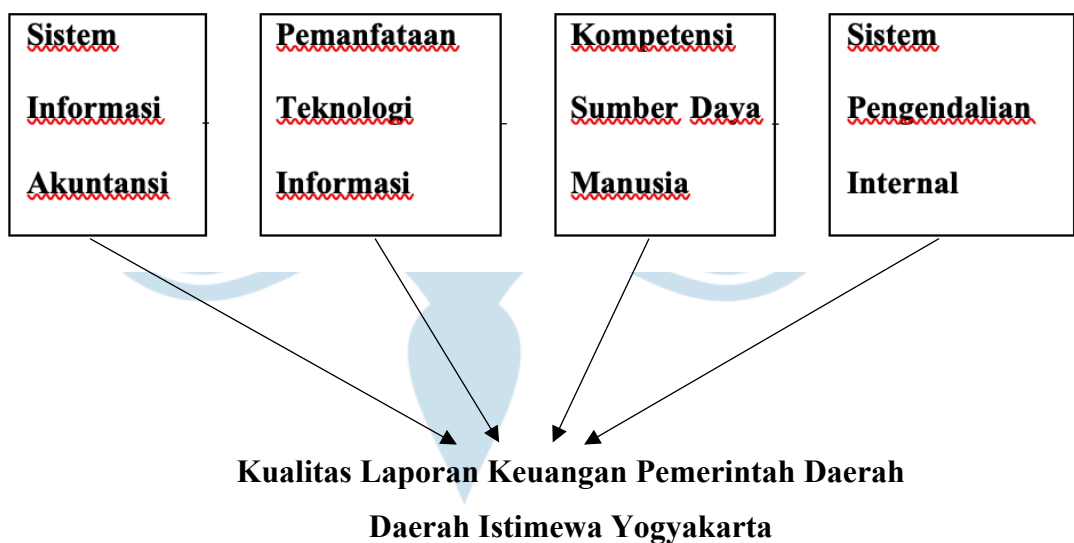
2.9.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Winarno (2006) sistem pengendalian intern memiliki empat tujuan, yaitu melindungi harta kekayaan perusahaan, meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang dijalankan oleh perusahaan, meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, sehingga dalam berbagai kegiatan dapat dilakukan penghematan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Penelitian terdahulu dari Nurillah dan Muid (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Sukmaningtyas (2017) Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2018) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Medan pun juga menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan. Prastiwi dan Mimba (2018) mengatakan bahwa sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄ = Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.10. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1